PERATURAN DESA MALANGSARI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027



RKPDesa

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027

Desa Malangsari Kec Tanjunganom

PERDES NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2027



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA MALANGSARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2027		1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2027		I-1
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum	I-2
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-3
	1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	I-3
BAB II	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	II-1
	2.1. Kebijakan Pendapatan Desa	II-1
	2.2. Kebijakan Belanja Desa	II-2
	2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa	II-4
BAB III	EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	III-1
	3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026	III-1
	3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026	III-4
	3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026	III-7
	3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026	III-9
	3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026	III-11
	3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026	III-12
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	IV-1
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2027	IV-1
	4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027	IV-2
BAB V	PENUTUP	V

KEPALA DESA MALANGSARI
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2026
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 dengan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 7) ;
20. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Malangsari Tahun 2017 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangsari Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Malangsasri Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGSARI
dan
KEPALA DESA MALANGSARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangsari.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Malangsari dibantu Perangkat Desa Malangsari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Malangsari.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Malangsari.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Malangsari.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Malangsari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA
Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   - 1.1. Latar Belakang
   - 1.2. Dasar Hukum
   - 1.3. Maksud dan Tujuan
   - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
   - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
   - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
   - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
   - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026
   - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026
   - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026
   - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2027

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027

e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangsari.

Ditetapkan di Malangsari
pada tanggal 29 September 2026
KEPALA DESA MALANGSARI,

M U J I A N T O

Diundangkan di Malangsari
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS DESA MALANGSARI

ENDANG PURWANTI

LEMBARAN DESA MALANGSARI TAHUN 2026 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MALANGSARI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Nganjuk ;
21. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa ;
22. Peraturan Desa Malangsari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malangsari Tahun 2019-2025 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Malangsari ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Malangsari serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2027 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2027. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2027 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2027, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2027 sebesar Rp.**1.783.561.000**,- (Satu milyar Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Lima ratus enam puluh satu rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	**3.250.000,00**	**173.317.000,00**	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.250.000,00	3.250.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset		170.067.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	**909.835.200,00**	**1.608.948.000**	
4.2.1.	Dana Desa	281.275.000	970.115.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	142.308.000	142.308.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	486.252.200	496.525.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	**1.296.000,00**	**1.296.000,00**	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.296.000,00	1.296.000,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	**914.381.200**	**1.783.561.000**	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2027 Proyeksi Belanja Desa Malangsari sebesar Rp. 1.768.561.000,- (Satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	607.216.062,52	813.441.000,00	
1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Siltap,tunjangan dan	485.722.962,52	638.085.000,00	
1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	00	43.000.000,00	
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.200.000,00	5.900.000,00	
1.4	Kegiatan tata praja Pemerintahan	42.279.500,00	39.200.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	00	51.256.000,00	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	355.292.000,00	635.920.000,00	
5.2.1	Kegiatan Bidang Pendidikan	9.300.000,00	50.800.000,00	
5.2.2	Kegiatan Bidang Kesehatan	72.224.000,00	104.820.000,00	
5.2.3	Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.318.000,00	422.800.000,00	
5.2.4	Kawasan Permukiman	00	37.000.000,00	
5.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	00	7.000.000,00	
5.2.6	Kegiatan Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	3.450.000,00	5.000.000,00	
5.2.7	Energi dan Sumber Daya Mineral	00	6.000.000,00	
5.2.8	Pariwisata	00	2.000.000,00	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	19.084.000,00	96.700.000,00	
5.3.1	Kegiatan Bidang Ketentraman,Ketertiban umum	5.040.000,00	27.000.000,00	
5.3.2	Kegiatan Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	15.000.000,00	
5.3.3	Kegiatan Bidang	2.700.000,00	30.000.000,00	

	Kepemudaan dan Olah raga			
5.3.4	Kegiatan Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.344.000,00	27.700.000,00	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	77.380.400,00	175.000.000,00	
5.4.1	Kegiatan Kelautan dan Perikanan	00	00	
5.4.2	Kegiatan Bidang Pertanian dan Peternakan	77.380.400,00	140.000.000,00	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	00	10.500.000,00	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	00	4.000.000,00	
5.4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	00	12.000.000,00	
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	00	4.000.000,00	
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	00	5.000.000,00	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	19.045.300,00	47.000.000,00	
5.5.1	Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	15.000.000,00	
5.5.2	Kegiatan Bidang Keadaan Darurat	1.645.300,00	5.000.000,00	
5.5.3	Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	27.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.078.017.762,52**	**1.768.561.000**	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
b. Pencairan Dana Cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Malangsari

Tahun 2027

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2026)	Proyeksi (2027)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0,00	0,00	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	**5.000.000,00**	5.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	00	10.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2026 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2026 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2026 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2026. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2026.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2026

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	635.143.000,00	485.772.962,52
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36,690.600,00	36.690.792,00
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	286.964.400,00	267.318.660,00
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.856.000,00	23.580.000,00
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.005.000,00	77.263.010,00
05	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	24.600.000,00
06	Penyediaan Operasional BPD	8.252.000,00	3.340.000,00
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	37.800.000,00
08	Penyediaan Operasional Pemdes yang Bersumber dari Dana Desa	23.800.000,00	8.400.000,00
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	152.775.000,00	0
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	55.000.000,00	0
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	30.000.000,00	0
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	5.000.000,00	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	20.000.000,00	0
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.900.000,00	1.200.000,00
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1.000.000,00	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.500.000,00	1.200.000,00
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.600.000,00	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000,00	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	400.000,00	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	75.200.000,00	42.279.500,00
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.000.000,00	2.560.000,00
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.680.000,00	1.041.000,00
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.500.000,00	5.488.500,00
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.300.000,00	0
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.600.000,00	950.000,00
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000,00	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000,00	500.000,00
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.000.000,00	0
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1.000.000,00	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	40.000.000,00	13.501.000,00
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	3.000.000,00	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	10.000.000,00	0
91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00
1.5	Sub Bidang Pertanahan	51.256.000,00,	78.013.600,00
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000,00	0
02	Administrasi Pertanahan	1.000.000,00	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	1.000.000,00	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	46.256.000,00	78.013.600,00
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	1.000.000,00	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1.000.000,00	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 36 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 20 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 0,55 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	23.482.104,00	Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.318.660,00	194.184.354,00	Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.580.000,00	0	Belum tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	77.263.010,00	47.069.887,03	Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	18.450.000,00	Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	3.340.500,00	1.854.000,00	Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	28.350.000,00	Tercapai
8.	Penyediaan Operasional Pemdes yang Bersumber dari Dana Desa	8.400.000,00	8.400.000,00	Tercapai
9.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1.200.000,00	0	Belum tercapai
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.560.000.00	491.000,00	Tercapai
11	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.680.000,00	1.041.000,00	Tercapai
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.488.500,00	660.000,00	Tercapai
13	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	950.000,00	0	Belum tercapai
14	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	500.000,00	134.300,00	Tercapai
15	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	13.501.000,00	0	Belum tercapai
16	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	3.600.000,00	Tercapai
17	Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD	12.800.000,00	1.228.000,00	Belum tercapai
18	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	78.013.600,00	0	Belum tercapai

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 12 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2026

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	50.800.000	9.300.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	41.800.000	0
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	5.000.000	7.800.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1.000.000	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1.500.000	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	104.820.000	72.224.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	10.000.000	0
02	Penyelenggaraan Posyandu	77.000.000	63.912.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000	0
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000	8.312.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	400.000	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.920.000	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.500.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	818.600.000	270.318.000
01	Pemeliharaan Jalan Desa	215.900.000	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	5.000.000	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	20.000.000	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	10.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	159.900.000	128.694.862
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang	113.000.000	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	149.650.000	117.684.038
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa	30.000.000	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	50.700.000	23.939.100
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	35.000.000	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	4.000.000	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	4.000.000	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	3.000.000	0
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	37.000.000	0
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	10.000.000	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	5.000.000	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	1.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	1.000.000	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	10.00.000	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	12.500.000	0
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.500.000	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	5.000.000	3,450.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.000.000	450.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.000.000	3.000.000
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	6.000.000	0
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	1.000.000	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	5.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.8	Sub Bidang Pariwisata	2.000.000	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	1.000.000	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	1.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 41 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 5,125 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	7.800.000,00	5.200.000,00	Tercapai
2.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1.500.000,00	0	belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	63.912.000,00	0	belum tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.312.000,00	0	belum tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	128.694.862,00	128.694.862,00	Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani	117.684.038,00	115.136.691,00	Tercapai
7.	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	23.939.100,00	23.936.194,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
8.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.450.000,00	2.104.100,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2026

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	24.000.000	19.084.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.000.000	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	2.000.000	0
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	5.000.000	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	0
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	2.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	5.040.000
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000	3.000.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000	3.000.000
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.0001	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	40.000.000	2.700.000
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5.000.000	
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.000.000	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	25.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	5.000.000	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.250.000	8.344.000
01	Pembinaan Lembaga Adat	5.000.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	1.200.000
03	Pembinaan PKK	10.550.000	7.144.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.000.000	0
90	Pembinaan Karang Taruna	1.200.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.500.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 4 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebanyak 0.22 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	5.040.000,00	0	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah	2.700.000,00	2.400.000,00	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
	raga			
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	900.00,00	Tercapai
5.	Pembinaan PKK	7.144.000,00	3.396.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 4 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2026

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	130.500.000	77.380.000
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1.000.000	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	5.000.000	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	20.000.000	0
04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	38.000.000	27.380.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	10.000.000	0
06	Pembanguna/ Rehabilitasi/Peningkatan saluran irigasi Tersier/Sederhana	56.500.000	49.880.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000	0
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.500.000	0
03	Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000	0
			0
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000	0
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	12.000.000	0
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	2.000.000	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	5.000.000	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	5.000.000	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang	2.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Dukungan Penanaman Modal		
			0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	5.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 0,11 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	27.500.000	13.500.000,00	Tercapai
2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersiaer/Sederhana	49.880.400	0	Tidak Tercapai
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2026

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2026 terhadap RKP Desa Tahun 2026

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	3.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000	1.645.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	89.000.000	14.400.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2026 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2026 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2026 sampai dengan bulan September 2026.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2026 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	0	Tidak Tercapai
2.	Keadaan Darurat	1.645.300,00	0	Tidak Tercapai
3.	Keadaan Mendesak	14.400.000,00	10.800.000,00	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 2 kegiatan
c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2026

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa ….. sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   1. Minimnya Kesadaran akan Tupoksi Perangkat Desa pada masing-masing Jabatan.
   2. Aplikasi siskeudes sering Mengalami gangguan
   3. Dukungan fasilitas kinerja masih kurang
   4. Tata Kelola administrasi kurang memadai
   5. Peran Lembaga dalam mendukung pemerintahan Desa belum maksimal

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   1. Penerimaan desa terlambat dari Daerah
   2. Pembangunan Terkena masalah hujan/cuaca
   3. Dukungan Fasilitas kinerja masih kurang

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   1.Kurangnya Fasilitas keamanan lingkungan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   1. Pemeliharaan saluran terkendala cuaca
   2. Bumdes kurang Maksimal
   3. Kurang kesadaran Masyarakat tentang kebersihan lingkungan dan saluran

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
   1. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan
   2. Tanggap kesiagaan bencana masih renda

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2026 dan permasalahan pembangunan di Desa Malangsari yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2026.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2026

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
   a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
      1) APB Desa Tahun Anggaran 2027
      2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2026
      3) RKP Desa Tahun 2027
      4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
   b. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap.Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
   c. Sarana Ptrasarana Pemerintah Desa
   d. Administrasi Kependudukan,Pencatatan sipil,Statistik dan Kearsipan
   e. Pertanahan
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan
   d. Kawasan Pemukiman
   e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
   f. Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
   g. Energi dan Sumber Daya Mineral
   h. Pariwisata

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
   a. Ketentraman,Ketertiban,Umum dan Perlindungan Masyarakat
   b. Kebudayaan dan Keagamaan
   c. Kepemudaan dan Olah Raga
   d. Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
   a. Pertanian dan Peternakan
   b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
   c. Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak
   d. Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
   e. Dukungan Penanaman Modal
   f. Perdagangan dan Perindustrian
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
   a. Penanggulangan Bencana
   b. Keadaan Darurat
   c. Keadaan Mendesak
6. Kegiatan Prioritas Bidang Pembiayaan
   a. Penyertaan Modal
   b. Dana Cadangan

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2026, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, efdeskel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2026
(Form Excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2027

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2027

DESA : MALANGSARI
KECAMATAN : TANJUNGANOM
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
	1 Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	3,16	1	1	1 Th	Desa	12 bln	Kades	36.690.600	add	√		
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Parades.Staf	286.964.400	add	√		
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Pemdes	21.856.000	add,pad, dd	√		
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	3,16	1	1	1 Th	Desa	12 bln	Pemdes	55.005.000	dd,add,pad,slp,bhprd	√		
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	3,16,18	5	5	1 Th	Desa	12 bln	BPD	24.600.000	add	√		
		6	Penyediaan Operasional BPD	3,16,18	5	5	1 Th	Desa	paket	BPD	8.252.000	dd,add,pad,slp,bhprd	√		
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	3,16,18	21	21	1 Th	Desa	12 bln	lembaga	25.200.000	dd,add,pad	√		
		8	Penyediaaan operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa	3,16,18	1	1	1 Thn	Desa	12 bln	Pemdes	8.400.000	dd	√		
		9	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,16	10	11	1 Th	Desa	12 bln	Kades,Parades	152.775.000	PAD	√		
		10	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	3,16	12	12	1 Thn	Desa	12 bln	Pemdes	18.342.000	pad	√		
	2 Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	3,16	0	1	1 Th	Desa	paket	pemdes	18.000.000	add,pad, slp,bhprd	√		
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,9	1	1	1 Th	Desa	paket	mayarakat	5.000.000	add,pad, slp,bhprd	√		
		3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,9	1	1	1 Th	Desa	paket	mayarakat	20.000.000	add,pad, slp,bhprd	√		
	3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
		2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.500.000	DD,SLP	√		
		3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.600.000	DD,SLP	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,5,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	400.000	DD,SLP	√		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,2,10	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	400.000	dd,slp	√		
	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	3,8,5,18	5	4	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.000.000	DD,SLP	√		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	3,8,5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.500.000	DD,SLP	√		
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3,8,5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	4.500.000	DD,SLP	√		
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3,8,5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.300.000	DD,SLP	√		
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3,8,5,18	2	2	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.600.000	DD,SLP	√		
			6	Penyusunan Kebijakan Desa	3,10,16	3	3	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,10,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	500.000	DD,SLP	√		
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,10,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	2.000.000	DD,SLP	√		
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	3,10	0	3	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	3,16	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	40.000.000	add,slp,pad,bk,bhprd	√		
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	3,16	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	3.000.000	pad,ADD,SLP	√		
			90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	3,5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	10.000.000	add,slp,pad	√		
			91	Forum Pembina Desa	3,5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	4.800.000	ADD,SLP	√		
	5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	17	12	12	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	ADD,SLP	√		
			2	Administrasi Pertanahan	16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
			3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
			6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	46.256.000	bhprd	√		
			7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
			90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.000.000	DD,SLP	√		
	Jumlah Bidang 1											**813.441.000**				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	1, 3, 4	1	1	1 Th	Desa	Paket	Lembaga	41.800.000	DD	√		
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	1,3,4	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	2	Kesehatan	3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	1,3,5	2	2	1 Th	Desa	paket	Lembaga	1.000.000	DD	√		
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1	1	1 Th	Desa	paket	Pemdes	1.500.000	DD	√		
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1,4, 3	0	5	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.500.000	DD/ADD /SLP	√		
			1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	2, 3, 4,5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			2	Penyelenggaraan Posyandu	2, 3, 4,5	1	1	1 Th	Desa	Paket	masyarakat	77.000.000	DD	√		
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2, 3, 4,5	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2, 3, 4,5	1	1	1 Th	Desa		masyarakat	10.000.000	DD,ADD, PAD	√		
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	2, 3, 4,5	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	400.000	DD	√		
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2, 3, 4,5	1	1	1 Th	Desa	12 Bln	lembaga	1.920.000	DD	√		
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2, 3, 4,5	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat		DD	√		
				a. Posyandu	2, 3, 4,5	1	1	1	Desa	paket	masyarakat	1.500.000	DD	√		
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1, 2, 3, 4,5	0	1	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa									dd	√		
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	8,11,16	1500	1500	1 Th	Desa	paket	masyarakat	115.900.000	DD/SLP	√		
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang									DD	√		
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,11,16	500	500	1 Th	Desa	250*3 m,	masyarakat	5.000.000	DD/SLP	√		
			4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa									DD	√		
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	8,11,16	200	200	1 th	Desa	00* 0,5 m	masyarakat	20.000.000	DD	√		
				a.Lampu penerangan	8,11,16	200	200	1 th	Desa			2.000.000	DD			
			6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan									DD	√		
			9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	8,9,16	0	1	1 bln	ar,santren	2 unit	masyarakat	10.000.000	bhprd,pad	√		
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	3,8,9	250	250	1 th	Desa	250*3 m	masyarakat	15.200.000	DD	√		
			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,8,9,11	100	150	1 th	Dsn Malangsari	8*0,20 m	masyarakat	108.000.000	DD/SLP	√		
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	3,9	1	1	1 th	Dsn Santren	6*4 m	masyarakat	30.000.000	DD/SLP	√		
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3,6,9,16	450	450	1 th	Dsn Santren	150m x 0,5m x 0,5m	masyarakat	50.700.000	DD/SLP	√		
			15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	8,9,11	0	1	4 bl	edesa	paket	masyarakat	20.000.000	DD,PAD, BHPRD,SLP	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6,7	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	35.000.000	DD,Pad, BHPRD,SLP	√		
			17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	8,9,11	0	1	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	4.000.000	dd,bhprd ,pad	√		
			18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	8,9,11	0	1	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	4.000.000	dd,bhprd ,pad	√		
			20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa	8,9,11	0	0	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	3.000.000	dd,bhprd ,pad	√		
	4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	6,7,9,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	6	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan	6	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√		
			13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√		
			15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	1,3,6,7	0	5	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
	5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa												
			2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3,6,7	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.500.000	DD	√		
		Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3,4,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3,4,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	3.000.000	DD	√		
	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	9	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√		
			2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	9	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
	8	Pariwisata	2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	3,8,12	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√		
			3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3,8,12	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	1.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 2												**635.920.000**				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3,10,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	3,10,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD,SLP, ADD,PAD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	3,10,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD,SLP, ADD,PA D	√		
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,13	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3,13	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pa d	√		
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	dd,slp,pa d	√		
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√		
			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√		
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3,9	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	15.000.000	dd,slp,pad	√		
			6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	dd,slp,pad	√		
	4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	3,18	0	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	dd,slp,pa	√		
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3,18	10	10	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.000.000	DD,ADD	√		
			3	Pembinaan PKK	5,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	8.000.000	DD,ADD	√		
			4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5,18	5	5	1 Th	Desa	paket	lembaga	3.000.000	DD	√		
			90	Pembinaan Karang Taruna	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	1.200.000	DD,ADD	√		
			91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	3,18	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	5.500.000	DD	√		
	Jumlah Bidang 3											**96.700.000**				
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
	2	Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3,6,7,12	25	25	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			2	Peningkatan Produksi Peternakan	3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			4	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,6,7,12	1500	1500	1 Th	Desa	1500*2	masyarakat	20.000.000	DD	√		
			5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	3,6,7,12	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	10.000.000	DD	√		
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersiaer/Sederhana	3,6,7,12	350	350	1 Th	Desa	350*2	masyarakat	85.000.000	DD	√		

No.	Bidang/Jenis Kegiatan				Mendu-kung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak-sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang			Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	3,16	1	1	1 Th	Desa	paket	Kades	1.500.000	ADD,PAD	√		
			2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,16	11	11	1 Th	Desa	paket	Parades,Staf	4.500.000	ADD,PAD	√		
			3	Peningkatan kapasitas BPD	3,18	5	5	1 Th	Desa	paket	BPD	4.500.000	ADD,PAD	√		
	4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,16	0	1	1 bln	Desa	paket	Masyarakat	2.000.000	DD	√		
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	5,16	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa							lembaga		DD	√		
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	8,16	1	1	1 Th	Desa	paket	lembaga	2.000.000	DD	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	8,16	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	2.000.000	DD	√		
	7	Perdagangan dan Perindustrian	4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	8,9	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD	√		
Jumlah Bidang 4												**175.500.000**	DD			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												DD			
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	13	1	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	15.000.000	DD,slp	√		
	2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat	2, 3, 13	0	1	1 Th	Desa	paket	masyarakat	5.000.000	DD,SLP	√		
	3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak.	, 2, 3,16	50	50	1 Th	Desa	paket	masyarakat	27.000.000	DD,SLP	√		
Jumlah Bidang 5												**47.000.000**				
6	**Pembiayaan**															
	1	Penyertaan Modal	1	Bumdesma Mandiri	3,8,13	1	1	1 th	desa	paket	lembaga	5.000.000	DD	√		
			2	Bumdesma Sekar Sari Jaya	3,8,13	1	1	1 th	desa	paket	lembaga	10.000.000	DD	√		
	2	Dana Cadangan														
Jumlah Bidang 6												**15.000.000**				
JUMLAH TOTAL												**1.783.561.000**				

BAB V
PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA MALANGSARI,

M U J I A N T O